

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang : 2017-2018  
Masa Persidangan : IV  
Rapat Ke- : 11  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat/ Rapat Dengar Pendapat Umum  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Senin, 16 April 2018  
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III)  
Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta  
Acara : Membahas permasalahan tentang Desa dan Perangkat Desa  
Ketua Rapat : **Dr. H. Mardani, M.Eng/ Wakil Ketua Komisi II DPR RI**  
Sekretaris Rapat : Drs. Nasrulloh, M.A.P/ Kabagset Komisi II DPR RI  
Hadir : A. 20 dari 48 Anggota Komisi II DPR RI  
B. Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri  
C. Deputi bidang SDM Aparatur Kementrian PANRB  
D. Badan Kepegawaian Negara  
E. Pengurus Pusat PPDI

## **I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat/ Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementrian PANRB, Badan Kepegawaian Negara dan Pengurus Pusat PPDI dengan agenda Membahas permasalahan tentang desa dan perangkat desa, pada hari Senin, 16 April 2018, dibuka pada pukul 10.30 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. Mardani, M.Eng dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN**

Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara bersepakat:

1. Perangkat desa berstatus sebagai bagian dari Pemerintahan Desa;
2. Perangkat desa mendapatkan Penghasilan Tetap (SILTAP) dan tunjangan setara dengan ASN golongan II-A dengan memperhatikan masa pengabdian;
3. Perangkat desa akan mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan sesudah penandatanganan Mou antara Kementerian Dalam Negeri dengan institusi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 8 Mei 2018 yang ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri dengan BPJS Ketenagakerjaan;
4. Kesepakatan ini sudah terlaksana selambat-lambatnya pada APBN 2019 setelah Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 13.30 WIB.

**Jakarta, 16 April 2018**  
**KETUA RAPAT**

ttd

**DR. H. MARDANI, M.Eng**  
**A-104**